



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 13 Maret 2017

Halaman: 2

BAYAR SEWA RP 500.000/TAHUN KE KELURAHAN

Warga Terancam Longsor Enggan Relokasi

YOGYA (KR) - Warga yang terancam longsoran tebing Kali Code di Terban Gondokusuman enggan pindah atau relokasi. Selain tidak memiliki tempat lain, kondisi ekonomi serta sosial menjadi alasan kuat untuk tetap tinggal di kawasan bantaran sungai tersebut.

Terdapat sembilan kepala keluarga (KK) dengan 30 jiwa yang terancam bahaya longsor. Selama sepekan ini, mereka tiap malam terpaksa menginap di pengungsian yang disediakan di Balai RW 01 Terban. Sedangkan pagi hingga sore hari, tetap kembali ke rumahnya.

Salah satu warga yang terancam bahaya longsor, Jumadiyanto, ketika ditemui *KR*, Sabtu (11/3), mengungkapkan jika semua warga yang mengungsi tersebut memang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang ditinggalinya.

Pasalnya, lahan yang mereka tempati adalah Sultan Ground yang dulunya lokasi makam cina atau bong. "Kami di sini juga bayar Pajak Bumi

Bangunan (PBB)," tandas Jumadiyanto yang rumahnya persis di samping talut tebing yang mulai retak.

Jumadiyanto mengaku sudah menetap di kawasan itu sejak tahun 1980an. Kendati ada wacana rumah susun sederhana sewa (rusunawa), namun hingga saat ini juga belum terbangun, sedangkan seluruh warga yang terancam sudah memiliki rumah.

Lelaki itupun berharap supaya pemerintah segera memperbaiki talut karena masih musim hujan, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi longsor susulan. "Dulu talut bagian atas memang dibangun oleh perorangan. Dari sisi konstruksi, sepertinya tidak sekuat yang di bawah," tuturnya.

Sementara warga terancam longsor lainnya, Murtini, juga mengaku masih ingin mendiami rumahnya yang telah dihuni sejak belasan tahun silam tersebut. Wanita itu tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain jika diminta Pemkot Yogya untuk pindah.

Bersama suaminya, Lia Karyono, Murtini sudah sekitar 17 tahun menghuni rumah yang tepat berada di sisi bawah sebelah utara talut yang longsor. Selain itu, wacana Pemkot yang akan merelokasi warga ke rusunawa justru akan lebih membebani hidupnya.

"Suami saya kerja serabutan. Penghasilan paling cuma Rp 60.000 perhari, habis untuk makan. Kalau pindah ke rusunawa, kami tak punya biaya untuk bayar sewa," paparnya.

Murtini mengaku, harapannya beserta para tetangga justru hanya satu, yakni perbaikan talut secara permanen. Baginya, kawasan permukimannya sudah memberikan kenyamanan tersendiri. Pasalnya sudah terdapat interaksi sosial yang harmonis dengan warga setempat. Dalam setahun, ia rutin membayar sewa sebesar Rp 500.000 ke kelurahan.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Yogya, Sulistiyo, mengaku ada rekomendasi untuk merelokasi warga yang terancam bencana. Namun hal itu belum akan menjadi prioritas. Warga masih disarankan untuk menginap di pengungsian.

"Periode mengungsinya belum bisa ditentukan sampai kapan. Yang jelas, kebutuhan selimut dan makanan kami penuh. Ketika kelak sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali, baru dibicarakan relokasi," urainya.

Terkait dengan upaya penanganan sejak terjadi longsor susulan pada pekan lalu, pihaknya sudah mengagendakan musyawarah dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) pada Senin (13/3) hari ini.

(Dhi)-m

.....
Sekretaris

Tindak Lanjut
Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jemпа Pers

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005